

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ENDE

Amelia Ahmad

Universitas Muhammadiyah Kupang

Sulaiman

Universitas Muhammadiyah Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun metode yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar yang di kumpulkan dan di analisis dan teknik analisis yang di gunakan ialah melakukan perbandingan antara implementasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dengan implementasi pada PP 71 Tahun 2010.

Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Dalam Penyusunan Akuntansi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende sesuai/sejalan dengan PP 71 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Hal ini di dukung dengan adanya peraturan pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Ende khususnya Dinas sosial , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende untuk menerapkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Saran dari penulis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan tetap memberikan sosialisasi di sertai pelatihan secara berkala kepada SDM dan menambah jumlah SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi khususnya akuntansi pemerintah agar penerapan akuntansi PP 71 tahun 2010 dapat berjalan optimal.

Kata Kunci: PP 71 Tahun 2010 tentang SAP, Penerapan Akuntansi

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah peralihan akuntansi pemerintah yang berbasis kas menjadi basis akrual. Hal ini mengharuskan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual secara penuh pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan indonesia yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di indonesia. Pemerintah

selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Halim (2014:54) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sementara Menurut Mardiasmo (2018:80) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola Keuangan Negara dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Tanpa adanya standar ini, maka laporan yang dihasilkan oleh Akuntansi Keuangan Daerah bisa jadi berbeda-beda di setiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru di tingkat Nasional.

Ketentuan dalam Undang-Undang No.17 tahun 2003 pada pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja. Yang berbunyi sebagai berikut: “ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 undang- undang ini dilaksanakan selambat lambatnya dalam 5 (lima) tahun.Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis akrual kas. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun standar akuntansi Pemerintah (SAP) berbasisi akrual yang di tetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005.dengan di tetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di indonesia yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Tanjung (2012:25) Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menjadikan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas. Untuk mewujudkannya diperlukan aparat pemerintah yang mampu menerapkan penggunaan basis akrual tersebut. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan

negara. Hal ini meliputi aparat pemerintah yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fitri Andriani, 2015). Dari hasil penelitiannya menyatakan para pelaku masih banyak belum memahami mengenai SAP 2010. Namun dalam kesiapan komitmen SDM, sarana dan prasarana, serta Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Kota Palembang sudah siap. Selanjutnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh, (Mita Mutika Sari, 2020). Kesiapan pemerintah Kota Palembang dalam implementasi SAP berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Selanjutnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Khoirul Ma'arif Joko Lelono, 2014). Hasil penelitiannya terdapat perbedaan penerapan akuntansi berbasis akrual dilihat dari tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan kerja.

Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende Provinsi NTT sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia juga berupaya memenuhi harapan pemerintah, dalam perbaikan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan SAP berbasis akrual. Sebagai entitas pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten Ende menggunakan anggaran dan belanja daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintah. Untuk itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP) pada akhirnya dapat mempengaruhi opini audit yang akan diterima oleh pemerintahan daerah Kabupaten Ende dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) sebagai pihak audit eksternal, pasalnya selama 5 tahun berturut-turut pemerintah daerah Kabupaten Ende telah memperoleh opini audit wajar dengan pengecualian (WDP) yang disebabkan berbagai faktor, antara lain:

1. Penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Kelemahan dalam Sistem penyusunan laporan keuangan dan pada tahun 2020 dan 2021 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tapi masih terdapat beberapa permasalahan atas catatan dari BPK yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ende, di antaranya terkait:
 - a) Pengelolaan insentif pemungutan pajak daerah tidak sesuai ketentuan;
 - b) Pengelolaan belanja tak terduga untuk kegiatan jaringan pengaman sosial belum sepenuhnya tertib; dan
 - c) Pengelolaan aset tetap pada pemerintah Kabupaten Ende belum sepenuhnya tertib.

Berdasarkan opini di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui penerapan akuntansi PP 71 tahun 2010 dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

A. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat(3) tentang standar akuntansi pemerintahan yang di singkat SAP adalah, prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah indonesia.

Sedangkan Menurut Halim (2014:54) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sementara Menurut Mardiasmo (2018:80) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola Keuangan Negara dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Tanpa adanya standar ini, maka laporan yang dihasilkan oleh Akuntansi Keuangan Daerah bisa jadi berbeda-beda di setiap daerah yang akan memunculkan persoalan baru di tingkat Nasional.

B. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Indra bastian (2010:138), tujuan SAP adalah meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah

Sedangkan menurut Pramudiana (2017), tujuan standar akuntansi pemerintah berdasarkan penejelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,laporan keuangan yang di hasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan tujuan yang di kemukakan diatas dapat di katakan bahwa tujuan SAP adalah pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan penegelolaan keuangan pemerintah.

C. Prinsip-prinsip dan pelaporan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP nomor 71/2010 yaitu:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada

saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka laporan realisasi anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah.

2. Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pada masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal

ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

LAPORAN KEUANGAN

A. Definisi Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010).

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 laporan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Kesimpulannya, laporan keuangan merupakan output atau hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini juga dapat menggambarkan indikasi kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

B. Komponen Laporan Keuangan SKPD

Komponen laporan keuangan daerah yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial. Menurut PP No.71 Tahun 2010 komponen laporan keuangan ada 5 yaitu :

1. LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas. umum negara/daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional(LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahas ekuitas merupakan laporan yang menghubungkan antara LO dengan neraca, sehingga penyusunan LO, LPE, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif dan data kuantatif. Data kualitatif data yang berkaitan dengan pengelompokan atau karakteristik yang tidak dapat di ukur ukurannya.dengan kata lain,data kualitatif di ekspresikan dengan kata-kata yang memiliki makna.

2. Sumber data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari obyek yang di teliti. menurut sugiyono (2010;137) yang menyatakan bahwa: sumber data primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpulan data. sedangkan data sekunder menurut sugiyono (2010;137) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah penelitian deskriptif kualitatif. tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data pada penelitian ini:

1. Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, teori serta jurnal dan skripsi dari peneliti terdahulu yang mendukung dalam upaya pemecahan masalah penelitian ini. peneliti juga mengumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Studi Lapangan

Yaitu kegiatan dimana peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah melakukan perbandingan antara implementasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende sesuai/sejalan atau tidak sesuai/sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende basis akuntansi di gunakan dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akrual, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ialah basis akrual sebagaimana di sebutkan dalam PP 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah Standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang di terapkan dalam APBN/APBD. Penerapan basis akrual penuh pada tahun 2015. Penyajian laporan keuangan yang digunakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Laporan Operasional (LO), Neraca, Perubahan Ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Untuk mengetahui penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan peneliti melakukan analisis dengan mengkomperasikan penerapan akuntansi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende sesuai/ sejalan atau tidak sesuai/sejalan dengan penerapan akuntansi PP 71 tahun 2010. Berikut ini perbandingannya pada tabel di bawah ini:

Tabel

Perbandingan Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Dengan Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende

PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah	Implementasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Keterangan
a. Pendapatan LRA		
1. Pengakuan Pendapatan di akui di terima di Rekening Kas Umum Daerah, atau Pendapatan diterima oleh bendahara penerimaan di SKPD, atau Pendapatan diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nma BUD.	1. Pengakuan Pendapatan LRA di akui pada saat kas di terima oleh bendahara penerimaan.	Sesuai
2. Pengukuran 3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (jumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bersifat variabel terhadap pendapatan bruto, dan tidak dapat dinggarkan terlebih dahulu di akrenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat di kecualikan.	2. Pengukuran Pengukuran pendapatan LRA di laksanakan menggunakan asas bruto .	sesuai

<p>3. Pencatatan Pencatatan Pendapatan-LRA dalam Buku Jurnal Di buat dalam konteks pemda sebagai entitas akuntansi anggaran.</p>	<p>3. Pencatatan Pencatatan Pendapatan-LRA dalam Buku Jurnal Di buat dalam konteks pemda sebagai entitas akuntansi anggaran.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>4. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran</p>	<p>4. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran</p>	<p>Sesuai</p>
<p>b. Pendapatan Operasional</p>		
<p>1. Pengakuan Diakui saat Timbulnya hak atas pendapatan (earned); Pendapatan direalisasi (realized), yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.</p>	<p>1. Pengakuan Diakui saat Timbulnya hak atas pendapatan (earned); Pendapatan direalisasi (realized), yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi..</p>	<p>Sesuai</p>
<p>2. Pencatatan Pencatatan Pendapatan LO Disusun dan di sajikan menggunakan basis akrual yang mana pencatatan LO di lakukan setelah transaksi terjadi walaupun kas belum di terima.</p>	<p>2. Pencatatan karena di akui dan di ukur dengan basis akrual pencatatan pendapatan LO di lakukan setelah transaksi terjadi walaupun kas belum di terima</p>	<p>sesuai</p>
<p>3. Pengukuran Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (jumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bersifat variabel terhadap pendapatan bruto, dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu di karenakan proses</p>	<p>3. Pengukuran Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan jumlah tersebut tidak boleh di kompensasikan dengan beban-beban yang ada.</p>	<p>Sesuai</p>

belum selesai, maka asas bruto dapat di kecualikan		
4. Penyajian Laporan Operasional	4. Penyajian Laporan Operasional	Sesuai
c. Akuntansi Belanja		
1. Pengakuan Saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah dan Saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsiperbendaharaan/KPA	1. Pengakuan Saat terjadinya pengeluaran kas dan di sahkan oleh bandahara dengan dokumen sumber	Sesuai
2. Pencatatan Pencatatan belanja di susun dan si sajikan menggunakan basis kas yang mana pencatatan di lakukan setelah kas di terima.	2. Pencatatan Pencatatan belanja di susun dan si sajikan menggunakan basis kas yang mana pencatatan di lakukan setelah kas di terima.	Sesuai
3. Pengukuran Pengukuran belanja di ukur berdasarkan nilai nominal.	3. Pengukuran Pengukuran belanja di ukur berdasarkan nilai nominal.	sesuai
4. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran	4. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran.	Sesuai
d. Akuntansi Beban		
1. Pencatatan Pencatata beban di susun dan di sajikan menggunakan basis akrual yang mana pencatatan di lakukan setelah transaksi terjadi walaupun kaas belum di bayarkan	1. Pencatatan Beban di susun dan di sajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual di catat setelah transaksi terjadi walaupun kas belum di bayarkan	Sesuai

<p>2. Pengakuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saat timbulnya kewajiban (yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah) - Saat terjadinya konsumsi aset (yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah). 	<p>2. Pengakuan</p> <p>Pengakuan beban Saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>3. Pengukuran</p> <p>Pengukuran pada beban diukur sebesar nilai nominal.</p>	<p>3. Pengukuran</p> <p>Pengukuran pada beban diukur sebesar nilai nominal.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>4. Penyajian</p> <p>Laporan Operasional</p>	<p>4. Penyajian</p> <p>Laporan Operasional</p>	<p>Sesuai</p>
<p>e. Akuntansi Aset</p>		
<p>1. Pengakuan</p> <p>Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.</p>	<p>1. Pengakuan</p> <p>Aset diakui pada saat Aset diakui pada saat telah di terima atau di serahkan hak kepemilikannya.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>2. Pencatatan</p> <p>Pencatatan aset tetap dilakukan di buku jurnal finansial bersamaan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran jika belanja modal ini dilakukan secara tunai</p>	<p>2. Pencatatan</p> <p>Pencatatan aset dilakukan di buku jurnal finansial bersamaan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran jika belanja modal ini dilakukan secara tunai.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>3. Pengukuran</p>	<p>3. Pengukuran</p>	

Pengukuran aset berdasarkan asetnya contohnya aset lancar seperti kas dan piutang di ukur sebesar nilai nominal.	Pengukuran aset berdasarkan asetnya contohnya aset lancar seperti kas dan piutang di ukur sebesar nilai nominal.	
4. Penyajian Di lembar muka Neraca	4. Penyajian Penyajian aset pada Neraca	Sesuai
f. Akuntansi Persediaan		
1. Pengakuan Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.	1. Pengakuan Pengakuan persediaan di akui saat dilakukan pembelian atau saat persediaan itu di terima	Sesuai
2. Pengukuran 1. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka di nilai berdasarkan Biaya perolehan 2. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya Standar Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar Nilai wajar	2. Pengukuran Persediaan di sajikan sebesar Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan	Sesuai
2. Pencatatan a. Metode Periodik : untuk jenis persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK (alat tulis kantor). Pencatatan dengan metode ini hanya	3. Pencatatan pencatatan pada persediaan menggunakan Metode Periodik dan Perpetual	Sesuai

<p>dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Dengan Metode Periodik, pencatatan dapat dilakukan dengan Pendekatan Aset atau dengan Pendekatan Beban.</p> <p>b. Metode Perpetual : untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Pada metode ini, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai atau jumlah persediaan selalu ter-update.</p>		
<p>3. Penyajian Persediaan dilaporkan dalam Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan</p>	<p>3. Penyajian Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan</p>	<p>Sesuai</p>
<p>g. Akuntansi Kewajiban</p>		
<p>1. Pengakuan/pengukuran a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal</p>	<p>1. Pengakuan/pegukuran kewajiban di akui dan di ukur pada saat dana pinjaman atau anggaran di terima.</p>	<p>Sesuai</p>

<p>b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul</p> <p>c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca</p>		
<p>2. Pencatatan Pencatatan di lakukan setelah transaksi terjadi walaupun kas belum di bayarkan. Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial</p>	<p>2. Pencatatan Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial</p>	<p>Sesuai</p>
<p>3. Penyajian Kewajiban akan dilaporkan di Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</p>	<p>2. Penyajian Kewajiban dilaporkan di Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)</p>	<p>Sesuai</p>
<p>h. Akuntansi Ekuitas</p>		
<p>1. Pengakuan Ekuitas di akui pada saat adanya dana masuk dari bandahara</p>	<p>1. Pengakuan Ekuitas di akui pada saat adanya dana masuk dari bandahara</p>	<p>Sesuai</p>
<p>2. Pencatatan ekuitas di susun dan di sajikan dengan menggunakan basis akrual di catat pada jurnal finansial.</p>	<p>2. Pencatatan ekuitas di susun dan di sajikan dengan menggunakan basis akrual di catat pada jurnal finansial.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>3. Pengukuran Pengukuran ekuitas di ukur sesuai jumlah kas yang di terima</p>	<p>3. Pengukuran Pengukuran ekuitas di ukur sesuai jumlah kas yang di terima</p>	<p>Sesuai</p>

4. Penyajian Ekuitas di sajikan pada neraca dan laporan perubahan ekuitas di ungkapkan pada CALK	4. Penyajian Ekuitas di sajikan pada neraca dan laporan perubahan ekuitas di ungkapkan pada CALK	Sesuai

Sumber:Olahan Penulis 2022

Dari hasil perbandingan menunjukkan penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende sesuai/sejalan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP (standar akuntansi pemerintah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas di ambi kesimpulan mengenai penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende menerapkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mulai pada tahun 2015. Sebagaimana di sebutkan dalam pertaturan pemerintah No.71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8 bahwa yang di maksud dengan SAP berbasis akrual adalah Standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang di terapkan dalam APBN/APBD.
2. Penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende sesuai/sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
3. Laporan keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende di susun berdasarkan PP 71 tahun 2010, yang terdiri dari Laporan LRA, LO, Neraca, Perubahan Ekuitas dan CALK (catatan atas laporan keuangan).

SARAN

1. Berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan cara tetap memberikan sosialisasi di sertai pelatihan secara berkala kepada SDM dan menambah jumlah SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan

akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan agar implementasi PP 71 Tahun 2010 secara penuh dapat berjalan optimal.

2. Hendaknya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dapat mempertahankan komitmen satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende dalam menerapkan basis akrual untuk pelaporan keuangan untuk selalu mendukung peraturan agar dapat terlaksana dengan baik.

REFERENSI

- Andriani., Fitri.2015.Pemahaman Dan Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual(Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang).Skripsi Program Studi Akuntansi.
- Dinda Astari., Febriansyah.2018.Analisis Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Tanjung Batu Kab.Ogan Hilir.universitas tridianti:sumatra selatan:jurnal ratri(riset akuntansi tridianti), vol.2, no.2, 2021.
- Faradillah, Andi. “Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)”.Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Fauziah. 2011 Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah). Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang
- Ferryono, Baries,2016.Manfaat Basis Akrual Dan Basis Kas Menuju Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah.Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX,Lampung.
- Halim, Abdul, dkk.2014. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Herwiyanti, Eliada, dkk. “Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2017.
- Kusuma, Riris Setiawati. “Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember)”.Skripsi. Universitas Jember, 2013.
- Lamonisi., Sony.2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon. Universitas Sam Ratulangi:Manado. Jurnal EMBA, Vol.4 No 1.
- Lelono., Khoirul Ma’arif Joko, 2014.Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual Pada Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga).skripsi program studi akuntansi
- Mardiasmo, 2018.Akuntansi sektor publik, ANDI Yogyakarta: Yogyakarta

- Novianti, Atilla Sandra. "Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI Dalam Menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya". Skripsi Thesis. Surabaya: Universitas Airlangga, 2017
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.
- Rantung, Veronika. 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado.
- Sari., Mita Mutika.2020.Analisis Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Peyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Pada Kantor Camat Sukarami Palembang.Skripsi Program Studi Akuntansi
- Sari, Yeni Priatna, dkk. "Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi AkruaI: Studi Kasus Di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kardinah Kota Tegal". *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*. Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2017.
- Sari, Yeni Priatna, dkk. "Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi AkruaI: Studi Kasus Di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kardinah Kota Tegal". *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*. Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2017
- .Simanjutak, Binsar H, 2005. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vo1 No. 1, 1 Mei 2005
- Sugiyono.2015.,*Metodelogi Penelitian*, Alfabeta : Bandung
- Tanjung, Abdul Hafiz . 2012. *Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pendekatan Teknis Sesuai Pp No. 71/2010*. Alfabeta : Bandun darise(2008;39).Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah.
- Titik Setyaningsih, 2013. Studi Eksplorasi Tigkat Pemahaman Apparatus Pemerintah Daerah Dan Anggota DPRD Terhadap Standar Akuntansi Berbasis AkruaI (Kasus Di Pemerintah Kota Surakarta). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*.
- Yusi Septia, 2013. Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Tahun 2011. *Jurnal Kaijian Ilmiah Akuntnasi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, Vol.2,No.3.
- Simanihuruk, Melly Heriawati. "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan". Medan:Universitas Hkbp Nommensen, 2013.
- Yuni Lindri Astuti,2017.*Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Kabupaten Karanganyar*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Institusi Agama Islam Negeri Surakarta.